

POLITIK LOKAL DI BANGKA BELITUNG Antara Timah dan Etnis Tionghoa

Rakhmad Kavin¹

Abstract

Political transformation in Indonesia in 1998, have an impact on the local administration, the whole society can participate to determine the direction of local development. Local political upheaval in Bangka Belitung province can not be separated from the natural resources of Tin became one of the sources of income of local communities and also Local revenue sources and also can not be separated from Chinese ethnic who is an ethnic with the second largest population after Malay ethnic who live and interact in the region of Bangka Belitung. This study illustrates how natural resources of Tin and Ethnic Thionghoa dyeing conditions local politics.

Keywords: Local Politic, Stannary, and Chinese Ethnic

PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya pemerintahan orde baru selama 32 tahun, membawa dampak signifikan terhadap system pemerintahan, salah satu perubahan dari era setelah masa soeharto ini adalah perubahan system pemerintahan yang semula berfokus pada pusat menjadi berpusat pada daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang – undang yang berlaku. Dampak reformasi ini juga memberikan angin segar kepada daerah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga menimbulkan adanya gerakan – gerakan pemekaran di daerah – daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, dengan berdalih ketika wilayah ini di mekarkan, maka pemerintahan akan lebih dekat dengan masyarakat. Tercatat hingga hari ini terdapat 8 provinsi pemekaran baru yang ada semenjak tergulingnya rezim orde baru².

Salah satu provinsi yang berdiri sendiri adalah provinsi kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 4 desember 2000 provinsi kepulauan Bangka Belitung telah resmi menjadi provinsi sendiri dengan ditetapkan Undang – undang nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi kepulauan Bangka Belitung³. Dilanjutkan dengan

¹ Penulis adalah analis Perumusan dan Kebijakan Strategik pada Pusat Perdesaan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dapat dihubungi melalui email: rakhmadkavin@gmail.com

² Dilaporkan oleh reporter Muhammad taufik (Selasa, 23 April 2013 07:03:00) pada saat peresmian Kalimantan Utara oleh menteri dalam negeri <http://m.merdeka.com/peristiwa/zaman-soeharto-27-eragus-dur-hingga-sby-jadi-34-provinsi.html>

³ Diakses di wikipedia (6 juni 2014)



pemekaran pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang terdiri dari 6 pemerintahan kabupaten dan satu pemerintahan kota.

Provinsi ini terkenal dengan wisatanya yang begitu indah dan menawan serta juga menjadi salah satu sumber tambang timah terbesar di dunia. Pernambangan timah dibangka Belitung dimulai pada tahun 1710 yang dilakukan oleh VOC, dan berlanjut terus hingga sekarang.

Indonesia merupakan salah satu produsen timah terbesar di dunia, dengan menghasilkan sekitar 106.000 ton timah balok sejak awal 2013 hingga Agustus 2013. Jumlah tersebut memasok lebih dari sepertiga pasokan timah secara global. Sebagian besar produk timah Indonesia diekspor ke Singapura (58% berdasarkan nilai), dimana dari sana timah tersebut dikirim ke negara-negara lain. Importir besar lainnya adalah Malaysia (13%), Jepang (7%), dan Belanda (6%). Dari jumlah tersebut, sekitar 90% timah di Indonesia berasal dari Provinsi Bangka-Belitung.⁴

Penambangan timah dilakukan pada dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Kegiatan penambangan darat dilakukan perusahaan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan yang berlokasi di sebagian besar Pulau Bangka dan Belitung serta Kepulauan Riau. Proses penambangan timah darat (alluvial) menggunakan metode pompa semprot (gravel pump) dimana pengoperasiannya sesuai dengan pedoman atau prosedur penambangan yang baik (Good Mining Practices). Untuk penambangan lepas pantai, Perusahaan mengoperasikan kapal keruk dengan jenis Bucket Line Dredges dengan ukuran mangkuk mulai dari 7 cuft sampai dengan 24 cuft dan dapat beroperasi mulai dari 15 sampai 50 meter dibawah permukaan laut dengan kemampuan gali mencapai lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulannya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi di laut⁵.

Hal ini menandakan provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kaya di Indonesia. namun tidak semua wilayah kaya dapat memberi dampak yang positif kepada wilayah tersebut. Ada dua dampak yang terasa dari penambangan yang terjadi selama ini diprovinsi ini. Pertama, dampak lingkungan, selain Kegiatan penambangan berlangsung baik di darat dan lepas pantai, kawasan hutan lindung dan hutan produksi serta laut yang memiliki ekosistem yang penting juga menjadi ladang penambangan timah⁶. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi pada hari Rabu (11/12/2013) " kehancuran lingkungan parah telah terjadi di Bangka. Wilayah laut Bangka Belitung adalah salah satu lokasi terumbu karang utama dunia. Kegiatan penambangan telah menyebabkan sedimentasi membuat terumbu karang hancur (*bleaching*). Akibatnya, tangkapan nelayan

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia.

⁴ Hasil penelitian kelompok kerja timah IDH Tahun 2013

⁵ PT Timah membangun Kapal Isap Produksi (KIP) dengan kemampuan gali mencapai 25 meter di bawah permukaan laut sehingga dapat menjangkau cadangan sisa dari kapal keruk, dan pengembangan Bucket Wheel Dredges yang nantinya akan menggantikan kapal keruk jenis Bucket Line yang mempunyai kemampuan gali sekitar 70 meter kubik dibawah permukaan laut, [http:// www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/910052012111105/operas/9610052010104055/](http://www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/910052012111105/operas/9610052010104055/) penambangan-darat-dan-laut/

⁶ Hasil penelitian kelompok kerja timah IDH Tahun 2013



berkurang hingga 80%,"⁷. Ditambah lagi ketika kita terbang diatas permukaan pulau Bangka Belitung, maka kita akan melihat kerusakan permukaan pulau. Dampak Operasi Penambangan Timah dengan Kapal Isap (KIP)⁸

1. Ekosistem laut rusak
2. Beroperasinya KIP akan diikuti dengan munculnya TI (Timah Inkonvensional) Apung
3. Banyak pendatang dari luar pulau untuk bekerja di TI Apung
4. Alih profesi dari nelayan ikan menjadi nelayan timah
5. Operasi KIP biasanya akan diikuti dengan munculnya preman (pembela perusahaan) dari kalangan masyarakat dan aparat pemda yang ikut bermain dengan pengusaha.
6. Harga ikan dipastikan akan bertambah mahal
7. Pengawasan pertambangan laut belum jelas dan tegas
8. Warisan yang tidak baik untuk anak cucu

Kedua, pendapatan dari hasil timah ini tidak merata berdampak pada masyarakat Bangka Belitung, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung (Babel), menyatakan tingkat garis kemiskinan pada September 2013 mencapai Rp427.081 per kapita atau naik 6,68 persen dibanding Maret 2013 sebesar Rp400.324 per kapita⁹.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, mulai dari kurangnya loby pemerintah terhadap perusahaan – perusahaan yang beroperasi pada penambangan timah di Bangka Belitung, sehingga kegiatan – kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan (CSR) kepada masyarakat yang dapat membantu pendapatannya meningkat tidak berjalan atau hanya sekedar kegiatan seremoni belaka.

Hal lain yang menjadi penyebab pada permasalahan ini adalah adanya penambangan liar (tidak memiliki izin) yang tidak bertanggung jawab, dimana oknum tersebut menyelundupkan hasil tambang dan tidak melakukan rehabilitasi kepada lingkungan yang ditambang. ada sekitar 15.000 hingga 50.000 penambang timah inkonvensional; sekitar 30 smelter swasta (angka ini berubah secara berkala, dimana banyak pabrik buka dan tutup tergantung harga timah); dan satu perusahaan pertambangan timah milik BUMN (tambang dan pabrik). Sekitar 70% timah Bangka-Belitung dihasilkan oleh smelter swasta, yang mendapat pasokan dari konsesi mereka sendiri serta para penambang inkonvensional¹⁰.

⁷laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi, Rabu, 11 Desember 2013 11:17 WIB

⁸ Disampaikan Indra Ambalika Syari, S.Pi (Dosen Perikanan UBB) pada Belitungku.com(portal informasi pulau Belitung terkini) pada bulan april 2013.

⁹ Laporan antaranews.com yang diunduh pada tanggal 6 juni 2014,

<http://www.antarabel.com/print/2511/dkp-babel-harapkan-perda-penambangan-dilaut>

¹⁰ Hasil penelitian kelompok kerja timah IDH Tahun 2013



Pihak intelijen Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, pada tahun 2006 melaporkan, nilai penyelundupan timah di Bangka Belitung mencapai sekitar Rp 10 miliar per bulan. Penyelundupan timah terjadi berkali-kali dan seolah menjadi suatu kelaziman. Pada akhir 2005, pernah terjadi penyelundupan timah sebanyak 714 karung pasir timah, atau senilai Rp 1 miliar. Timah yang diselundupkan ke luar wilayah Indonesia, umumnya berasal dari tambang-tambang rakyat (TI). Awalnya, penambang mitra PT Timah masih menjual seluruh hasil tambang timahnya ke PT Timah. Namun, godaan harga yang lebih tinggi dari pembeli lain membuat penjualan timah ke PT Timah menurun. Penambang TI menjadi marak setelah UU Otonomi Daerah disahkan dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 menyatakan timah dikategorikan sebagai barang bebas¹¹.

Dapat dilihat bahwa timah yang menjadi ikon provinsi ini belum mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Pola kerjasama yang baik dengan mengedepankan factor saling menguntungkan dibutuhkan dalam memaksimalkan potensi yang ada. Peran pemerintah dibutuhkan untuk itu. Pemerintah harus bisa menjadi fasilitator untuk terwujudnya good governance. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state/negara/ pemerintahan*), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Tiga domain ini memiliki fungsi yang saling terkait satu sama lain untuk menciptakan kesejahteraan bersama¹².

1. *Institute the governance (state) aim to realize the clean and good government (clean and good government-CGG)*
2. *Corporate world (private sector) to realize the good corporate world management (good corporate governance – GCG)*
3. *Society addressed to increase society role which good progressively (good society governance-GSG)*

Penambangan timah yang cukup besar seakan timpang dengan kondisi yang ada pada masyarakat. Masyarakat seakan hanya mendapatkan dampak negatifnya saja, baik kerusakan lingkungan maupun tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini dapat terjadi ketika masyarakat tidak diikutsertakan dalam pembuatan kebijakan. Mereka hanya berperan sebagai penerima saja, tidak sebagai pelaku. Yang ditakutkan adanya permainan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dengan pihak swasta yang berujung pada kepentingan pribadi dan kelompok.

TEORI

Politik Lokal

Politik lokal yang ada didunia tidak terlepas dari sejarah negara-negara Eropa Barat dimana adanya demokrasi yang terinspirasi dari proses politik lokal kaum

¹¹ Eramuslim.com, Muhammad Nuh – Kamis, 21 Muharram 1431 H / 7 Januari 2010 11:29 WIB
Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung

¹² Di kutip dari Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.si develop East Kutai en perspective of future,
Hal 143



aristokrat yang memperjuangkan hak-hak mereka atas penyimpangan kewenangan (*abuse of power*) oleh penguasa yang zhalim. Banyak Negara-negara yang memproklamasikan menjadi negara demokrasi berpangkal dari politik lokal yang ingin melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme. Di Indonesia, sejarah politik lokal bermula dari penjajahan Kolonial Belanda, desentralisasi kekuasaan, dan administrasi pemerintahan. Sejarah politik lokal terbagi dalam beberapa tahapan masa, yaitu: penjajahan kolonial Belanda; penjajahan kolonial Jepang; pasca kemerdekaan tahun 1945; Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949; Demokrasi Parlementer; Demokrasi Terpimpin; Orde Baru; dan Pasca Orde Baru¹³.

Bentuk ketidakpercayaan Masyarakat lokal pada pemerintahan yang terpusat menyebabkan adanya pergolakan politik lokal. kondisi tersebut dapat dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang tidak berimbang dan berkembang sehingga memunculkan reaksi sosial yang menginginkan adanya alternatif lain yang dapat diterapkan guna memperbaiki kondisi pembangunan daerah. Pada kondisi tersebut masyarakat sipil dikonseptualisasikan sebagai wadah perlawanan yang memungkinkan pemunculan kembali identitas daerah yang hilang selama rezim otokratik berkuasa. Masyarakat sipil dalam banyak kenyataan memang dianggap sebagai media bagi transformasi politik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sipil bukan hanya sebagai ikatan sosial di luar organisasi resmi yang mampu menggalang solidaritas kemanusiaan bagi menciptakan kebaikan bersama di bawah prinsip egalitarianisme dan inklusivisme universal tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mengimbangi kekuasaan pemerintah serta menghalangi tindak tanduk mereka yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Selain itu Masyarakat sipil juga dipercaya mampu memainkan peran sebagai pengawal kepentingan masyarakat umum dan dapat menghalangi pemerintah dari upaya mendominasi dan memanipulasi masyarakat. Dengan arah yang tidak berlawanan, sebagaimana Chandhoke¹⁴, menambahkan bahwa masyarakat sipil merupakan: "... the Sie at which society enter into relationship Alt the state." Dari aspek inilah, masyarakat berinteraksi dengan pemerintah untuk memunculkan berbagai wacana kritis yang objektif dan rasional sehingga mampu untuk meredam keinginan penguasa yang berlaku otokratik¹⁵.

Pada tahun 1998, perlawanan melalui masyarakat sipil dapat menjatuhkan rezim Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Indonesia mengalami transformasi politik dimana perubahan administrasi pemerintahan hingga politik lokal terus terjadi. Undang-undang 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan

¹³ Dapat dilihat pada "dinamika politik lokal" oleh penulis Ratri Istantia yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Lembaga Administrasi Negara tahun 2009. Hal 7,8

¹⁴ Chandhoke, N. 1995. State and civil society: Exploration in political theory. London: Sage Publication. Hlm. 8-13.

¹⁵ Dikutib dari jurnal Ilmu Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia "Politik Lokal Di Indonesia : dari Otokratik ke reformasi Politik" oleh penulis Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, edisi ke 21 tahun 2010



peraturan perundang-undangan. Masyarakat diberikan ruang besar untuk ikut serta dalam membangun Daerah mereka. Prinsip desentralisasi menjadi domain utama dalam menggerakkan dan menjalankan Pemerintahan Daerah. Pada esensinya politik lokal merupakan kegiatan politik di level lokal yang mencakup pemerintahan lokal, kebijakan level lokal dan pemilihan kepada daerah.

Politik Ekonomi Lokal

Asas desentralisasi berdampak pada perkembangan ekonomi daerah, ada tiga konsep politik ekonomi lokal yang dipraktikkan pada Daerah Otonom yakni ¹⁶:

- a. *Crony capitalism* atau kapitalisme kroni merupakan terminologi digunakan untuk melukiskan ekonomi kapitalis dimana kesuksesan bisnis tergantung dari seberapa dekat hubungan pengusaha dengan aparat pemerintah. Kroniisme ini menjadi praktek yang seringkali terjadi di negara berkembang dengan memberikan perlakuan khusus kepada para pengusahanya misalnya pembebasan pajak, pemberian ijin khusus, bantuan pemerintah, dan lainnya. Tujuan dari praktek kroni tersebut adalah melanggengkan kekuasaan pemerintah dengan memberikan akses kepada pengusaha mengalirkan dana sebagai imbalan atas kemudahan usaha yang diberikan pemerintah. Menurut Barbara harriss-white (2003:89), kroni dapat meningkatkan kewibawaan politik dari adanya kekuatan keras, namun dari kemampuan mengendalikan pasar dan imbalan material, atau, dengan kata lain, dari hegemoni di black economy.
- b. *Rent-seeking bureaucracy* timbul sebagai akibat perbuatan seseorang, kelompok, ataupun organisasi tertentu, terutama birokrasi, yang mengambil keuntungan materi sebesar-besarnya dari menjual kewenangan dan praktek manipulasi untuk mendukung pihak lain mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi.
- c. *Shadow state* konsep yang bercirikan suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh aparaturnegara yang bertindak berdasarkan kepentingan kaum swasta ataupun aktor-aktor eksternal lainnya di luar institusi negara. Aktor-aktor tersebut dapat merupakan penyedia jasa dan barang kepada pemerintah, dimana terdapat kewajiban pemerintah membeli kepada mereka tanpa harus melalui prosedur pembelian yang legal misalnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa atau lelang. Shadow state digerakkan oleh hukum yang tidak tertulis, senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan kepentingan pengusaha. Kerjasama di antara mereka akan menimbulkan gejala monopoli di dalam penguasaan sumber-sumber utama ekonomi yang akan selalu diliputi ketidakpastian. Warga negara hidup di dalam shadow state ditandai dengan lebarnya jurang kemiskinan antara miskin dan kaya sebagai akibat tidak adanya aturan tegas memberikan akses kesejahteraan bagi kaum kurang beruntung.

¹⁶ Op.cit...Ratri Istaniana. Hal 62, 63



METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui buku-buku, artikel, dokumentasi media sosial. Penulis menganalisis data dan informasi terkait tambang timah dan etnis Tionghoa dalam membangun politik lokal di provinsi Bangka Belitung.

PEMBAHASAN

Basis Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung

Perubahan yang sangat mencolok semenjak adanya otonomi daerah, pemerintah pusat yang dulunya pada masa orde baru memiliki peran aktif dalam pengelolaan tambang timah, sekarang harus melepaskan kebebasan daerah mengurus tambang timah yang menjadi ikon Bangka Belitung. Pada masa Soeharto penambangan timah merupakan otoritas pemerintah dan perusahaan yang ditunjuk. Dimana terjadi monopoli dari pengelolaan timah. Masyarakat tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan timah, bahkan pada masa itu terjun dalam timah sama dengan siap untuk masuk penjara.

Pada era reformasi otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang lebih banyak untuk menentukan arah pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya masing – masing. Begitu juga dengan provinsi Bangka Belitung, penambangan timah yang bebas dimulai dari penerbitan “surat keputusan bupati Bangka nomor 6 tahun 2001 tentang pengelolaan penambangan umum”, pada waktu itu yang menjabat sebagai bupati adalah Eko Maulana Ali, beliau beranggapan bahwa ekonomi kemasyarakatan dapat di jalankan melalui pemanfaatan sumberdaya timah yang ada. Menariknya, setelah SK tersebut terbit, penambangan skala kecil mulai bermunculan dipenjuru Bangka Belitung¹⁷

Ketika kita memetakan penghasilan dari masyarakat Bangka Belitung, maka dapat di pastikan sebagian besar dari masyarakat tidak terlepas timah. Perhitungan BPS, proporsi terbesar—lebih dari sepertiga bagian—gerak ekonomi bertumpu secara langsung pada pertambangan dan industri pengolahan hasil tambang. Selebihnya seperti sektor jasa, keuangan, dan perdagangan yang sebenarnya langsung atau tidak langsung bersentuhan pula dengan pertambangan. Diperkirakan hampir 70 persen ekonomi provinsi ini digerakkan oleh keberadaan timah.¹⁸

Peran timah di Bangka Belitung juga tidak terlepas dari karakteristik penduduk yang lebih memilih mata pencarian yang cepat menghasilkan uang serta dalam jumlah yang banyak. Konon masyarakat Bangka Belitung kurang menyukai

¹⁷ Aktivitas itu diikuti kehadiran ratusan penjual alat tambang dan puluhan pabrik peleburan timah swasta yang menampung pasir timah dari penambangan skala kecil. Bahkan, induk koperasi polisi (inkopol) pernah menjadi penjual resmi peralatan tambang dan penampung pasir timah.
<http://tekno.kompas.com/read/2011/12/01/02222527/pergolakan.demi.timah.terulang.lagi>

¹⁸ Ditulis oleh Sebastian Nainggolan pada media Kompas, 29 November 2011, selisik rumah demokrasi Bangka,
<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02433433/Selisik.Rumah.Demokrasi.Bangka.Belitung>.



mata pencarian yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengelolaannya, contohnya pertanian, budidaya ikan dan lainnya. Masyarakat Bangka Belitung lebih memilih untuk menambang timah yang langsung bisa dijual cepat pada pedagang dan langsung mendapatkan uang. Proses yang dilakukan cepat dan menghasilkan uang banyak. Zulfari, Ahong, dan Parno, petambang yang berbeda suku, bekerja sama dalam satu kelompok kerja, mengungkapkan tidak terlalu sulit mengais rezeki timah. Minimal Rp 100.000 mereka dapatkan dalam sehari. "Jika beruntung dan harga timah tinggi, seminggu bisa Rp 5 juta," ungkap Zulfari. Kemudahan ini mendorong daya beli masyarakat, yang secara agregat tergolong tinggi. Data BPS mengungkapkan, rata-rata daya beli masyarakat Rp 639.000 per kapita per tahun, di atas daya beli rata-rata per kapita Indonesia.¹⁹

Timah dan Politik di Bangka

Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat, pada tahun 1812, terlihat pergolakan perebutan kekuasaan untuk menduduki sebuah wilayah yang kaya. Prancis, Inggris dan Belanda pernah betarung memperebutkan wilayah kesultanan Palembang Darussalam. Kekuatan Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan Colonel Robert Gillespie menyerang Mahmud Baharudin II, demi menguasai kekayaan timah Bangka. Raffles dalam berbagai surat kepada Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto, menegaskan pentingnya menguasai Bangka karena kekayaan timahnya. Oleh karena itu, setelah menggilas pasukan Napoleon di Jawa yang dipimpin Jean Guillaume (dalam bahasa Belanda disebut Jan Willem) Janssens, Raffles mengarahkan pasukan ke Palembang yang kala itu menguasai penambangan timah di Bangka dan lama berkongsi dengan Belanda lewat perdagangan lada (*Piper nigrum*) dan timah.²⁰

Kemudian digambarkan bahwa perseteruan di atas membuktikan timah di Bangka sarat akan nilai politik dan ekonomi sejak masa penjajahan hingga sekarang 14 tahun menjadi provinsi kepulauan. "199 tahun sejak aksi militer Raffles, nilai itu tetap bertahan di Bangka dan Belitung. Bahkan, nilai itu semakin kuat selepas Bangka dan Belitung membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Sumatera Selatan pada 2000". Kemudian Reinout Vos dalam buku *Gentle Janus, Merchant Prince: The VOC and the Tightrope of Diplomacy in the Malay World 1740-1800* terbitan KITLV Belanda tahun 1994 dengan gamblang memaparkan betapa penguasaan timah menjadi salah satu faktor penentu dalam persaingan ekspansi serikat dagang Eropa dan sejumlah Kesultanan di sekitar Sumatera dan Semenanjung Malaya.²¹

¹⁹ *ibid*

²⁰ Ditulis oleh Krismada dan Ian Santoso pada media Kompas, Kamis, 1 September 2011, pergolakan demi timah terulang kembali.

<http://tekno.kompas.com/read/2011/12/01/02222527/pergolakan.demi.timah.terulang.lag>

²¹ *ibid*



Perbenturan kepentingan sering terjadi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, dapat di lihat, pertarungan kepentingan terkadang hanya menguntungkan pihak tertentu yang seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Hal tersebut berdampak bagi masyarakat luas. Pemanfaatan sumber daya yang ada hanya memuaskan segelintir orang saja. Ironisnya oknum swasta rela memberikan uang suap kepada pemegang kekuasaan untuk menggoalkan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Satu contoh menarik yang disampaikan mantan anggota DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hazil Ma'ruf. Semasa menjadi anggota DPRD Bangka, ia pernah didatangi pengusaha kapal isap pasir timah. Pengusaha itu membawa uang tunai ratusan juta rupiah. Uang tersebut akan diberikan kepada Hazil kalau dia mau mendukung pengoperasian kapal isap di perairan Pesaren, Bangka, yang merupakan wilayah konstituennya. "Saya menolak tawaran itu karena kompensasi untuk konstituen tidak jelas. Pengoperasian kapal isap akan menghancurkan daerah tangkapan warga Pesaren yang hampir seluruhnya nelayan. Para nelayan bertekad melawan, bahkan kalau perlu, membakar kapal isap timah," paparnya, Rabu (23/11),²² di Belinyu, Bangka.

Dampak hal tersebut mengakibatkan mata pencarian warga menjadi hilang, ketika penambangan diadakan di darat, maka wilayah pertanian dan perkebunan menjadi hancur dan tidak bisa di gunakan lagi sebagai lokasi mata pencarian, begitu juga ketika penambangan timah diadakan di laut maka, nelayan akan kualaahan mencari lokasi penangkapan ikannya. "A Kioen, nelayan warga Pesaren, mengaku, meski tidak ada kapal isap yang beroperasi di dekat mereka, keberadaan kapal isap timah pada musim tertentu mengakibatkan tangkapan merosot tajam akibat keruhnya air laut di pesisir Pesaren."²³

Ada dua dugaan kuat hubungan antara pelaku usaha dan elit politik. Pertama, swasta dalam artian pengusaha local, hadir bersama mendukung calon kepala daerah atau anggota DPRD tertentu untuk menduduki jabatan –jabatan penentu kebijakan, hal itu dilakukan dengan mendukung secara formal maupun material, secara formal di lakukan dengan dukungan promosi dan kampanye tertentu, dan secara material, mereka hadir dengan rupiah untuk mendukung calon kepala daerah maupun calon DPRD tertentu. hal ini dilakukan dengan tujuan suatu saat "akan ada timbal balik antara saya dan dia". Presiden Asosiasi Timah Indonesia Hidayat Arsani mengatakan tidak dapat ditampik, pengusaha timah banyak menyumbang kepada politisi di Bangka Belitung. Namun, ia tidak menjawab tegas apakah sumbangan itu diiringi permintaan untuk menyukseskan bisnis timah atau tidak. "Politik perlu biaya. Di Bangka Belitung, sebagian biaya itu disumbang oleh pengusaha timah. Mereka menyumbang ke semua tokoh dan partai politik yang dihitung sebagai biaya 'pengamanan' investasi," tuturnya. Bahkan, sejumlah pengurus parpol adalah pengusaha timah. Fakta itu, ujar Hidayat, adalah salah satu jalur lain dana timah

²² ibid

²³ ibid



masuk politik. "Tidak salah kalau kader menyumbang ke partai sendiri. Ada juga pengusaha yang bukan pengurus partai," ujarnya.²⁴

Kedua, swasta hadir bukan sebagai pendudukan salah satu calon kepala daerah maupun DPRD, namun mereka hadir sebagai pesaing dari calon lainnya, para pengusaha pemilik modal berlomba-lomba menduduki jabatan penentu kebijakan. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka mampu membayar partai politik untuk memasukkan nama mereka pada bursa pemilihan umum daerah. Dapat dilihat beberapa calon kepala daerah yang ada di Babel berlatar belakang pengusaha timah.

Akhir – akhir ini, cara pandang swasta sudah mulai berbeda dengan keinginan konsumen, para pengusaha merubah orientasinya bukan lagi semata – mata kepada masyarakat sebagai konsumen dengan meningkatkan kualitas produk mereka sehingga konsumen dapat lebih selektive dalam memilih produk kebutuhannya. Namun para pengusaha berlomba – lomba mengarahkan orientasinya kepada pemegang kekuasaan. Mereka lebih active mendekati diri kepada para pembuat kebijakan daripada kepada masyarakat. Asumsinya adalah pertama, pemerintah setiap tahunnya sering mengadakan lelang pembelian barang public, mulai dari yang yang manfaatnya bersifat langsung kepada masyarakat, maupun yang tidak langsung kepada masyarakat. Hal ini yang membuat para pelaku swasta berlomba mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Caranya dengan memasukkan orang – orang terdeka mereka, atau orang yang dianggap dapat menjembatani mereka untuk mendapatkan proyek tersebut pada elit – elit politik di daerah. Kedua, pemerintah sebagai penentu arah kebijakan, tidak selamanya akan mengarahkan kebijakannya menguntungkan ke arah usaha dari para pelaku swasta, untuk dari itu, mereka harus memegang orang yang mampu mengamankan posisi usaha mereka bahkan memperluas usaha mereka. Dari asumsi diatas maka dapat dilihat bahwa keterkaitan antara politik dan ekonomi (timah) sangat kuat.

Politik Etnis Tionghoa di Bangka Belitung

Pilkada langsung membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan hak politiknya untuk di pilih dan memilih, ketika keran pilkada langsung di buka, maka banyak actor – actor politik baru yang mulai bermunculan. Seluruh etnis, agama, dan suku berlomba maju mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Yang menarik, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini ternyata juga dipengaruhi oleh etnis, suku dan agama tertentu, ketika suatu wilayah penduduknya di tempati oleh penduduk etnis, suku, dan agama tertentu, maka orang dari golongan mereka lah yang lebih banyak berpeluang di pilih sebagai kepala daerah, hal ini dapat dilihat dari pemilihan gubernur provinsi Kalimantan barat, lembaga survey Indonesia meneliti bagaimana faktor etnis berpengaruh pada pilkada. Menurut Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk di Kalimantan Barat yang beragama Islam sejumlah 57.62% dan Kristen sebanyak 34.01%, Hindu 0.21%, Budha 6.41% dan lainnya 1.74%. Meski Islam merupakan agama mayoritas, jumlah penduduk

²⁴ ibid



beragama Kristen juga cukup besar di Kalimantan Barat. Di sejumlah kabupaten (seperti Bengkayang, Landak, Sanggau dan Sintang) agama Islam justru minoritas.²⁵

Pada pilkada Kalimantan barat tahun 2007, tercatat ada 4 pasang calon yang bertarung disana. Dari keempat calon tersebut, hampir rata – rata mereka meruapakan perpaduan dari struktur masyarakat yang ada dikalimantan barat. mereka merupakan representasi gabungan dari suku, etnis dan agama yang ada di Kalimantan barat. namun hanya satu pasang calon yang memiliki struktur yang sama, yaitu cornelis-christiandy, mereka berlatar belakang agama Kristen. Berikut komposisi pasangan calon :

| No | Nama pasangan calon | Etnis | agama |
|----|--------------------------|--------------|---------|
| 1 | Akil mochtar | Melayu | Islam |
| | Anselmus robertus mercer | Dayak | kristen |
| 2 | Usman Djafar | Melayu | Islam |
| | LH Kadir | dayak | Kristen |
| 3 | Oesman Sapta | Bugis-padang | Islam |
| | Ignasius lyong | Dayak | Kristen |
| 4 | Cornelis | Dayak | Kristen |
| | Christiandy sanjaya | tionghoa | Kristen |

Sumber : Kajian bulanan edisi 09 januari 2008, lingkaran survei Indonesia, factor etnis dalam pilkada

Etnis, suku dan agama menjadi pertimbangan kuat pemilih dikalimantan barat, Lembaga survey Indonesia menyatakan bahwa sebanyak 56,4% responden menyatakan akan memperharikan latar belakang agama kandidat dan 44,3% menjadikan etnis kandidat sebagai pertimbangan dalam memilih calon. Dari hasil penelitian diatas menyatakan bahwa pemilih pada etnis, agama tertentu lebih memilih etnis dan agama yang sama dengan mereka, terlihat, pemilih islam di Kalimantan barat terpecah suaranya menjadi 3, sehingga suara tersebut tidak menghantarkan kandidat dari islam menang, sedangkan pemilih dari agama Kristen lebih memilih calon gubernu dan wakil gubernur cornelis dan christiandy yang sama – sama berlatar belakang Kristen, sehingga kedua pasang tersebut menang telak 43.67%. diduga kemenangan cornielis banyak disumbang oleh pemilih Kristen Kalimantan barat jumlahnya cukup besar 34,01%.²⁶

Berbeda dengan Kalimantan barat, Provinsi kepulauan Bangka Belitung, etnis maupun agama tidak berpengaruh sangat besar dalam pemilihan kepala daerah. Dalam pemetaan masyarakat,. Badan Pusat Statistik (BPS) mengurai, di Bangka

²⁵ Hasil penelitian lingkaran survey Indonesia tentang factor etnis dalam pilkada, kajian ini melihat pengaruh etnis yang ada di provinsi Kalimantan barat, Sulawesi selatan dan Bangka Belitung. Yang ditebitkan dalam Kajian bulanan edisi 09 januari 2008, lingkaran survei Indonesia (LSI)

http://www.academia.edu/3150565/The_Politics_of_Ethnicity_and_Identities

²⁶ ibid



Belitung komposisi penduduk berdasarkan etnisitasnya terbesar adalah Melayu Bangka dan Melayu Belitung sekitar 69 persen. Tionghoa dengan populasi 11 persen. Selain itu, ada Jawa (6 persen), Bugis-Makassar (3 persen), Madura, dan sejumlah suku lain.²⁷ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa etnis tionghoa menduduki posisi kedua terbanyak jumlah penduduk per etnis yang ada di Bangka Belitung. Pergerakan etnis tionghoa akhir – akhir ini di Bangka Belitung cukup terasa pada kancah politik.

| Etnis | Jumlah | Persentasi (%) |
|-------------|---------|----------------|
| Melayu | 646.194 | 71.89 |
| Tionghoa | 103.736 | 11.54 |
| Jawa | 52.314 | 5.82 |
| Lainya | 49.628 | 5.52 |
| Bugis | 24.162 | 2.69 |
| Madura | 9.985 | 1.11 |
| Sunda | 8.316 | 0.93 |
| Minangkabau | 3.047 | 0.34 |
| Betawi | 1.043 | 0.12 |
| Banten | 279 | 0.03 |
| Banjar | 185 | 0.02 |
| Total | 989.889 | 100.00 |

Sumber : Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta, Indonesia's Population :ethnicity and Rligion in a Changing Political landscape, Singapore, ISEAS, 2003

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Bangka Belitung terbesar adalah suku melayu yang rata – rata beragama islam. Setelah itu diikuti oleh penduduk etnis tionghoa dan jawa, serta penduduk lainnya.

Terbentuknya masyarakat Bangka Belitung tidak terlepas dari penambangan timah, mereka berdatangan dari etnis melayu, tionghoa, jawa dan lainnya membentuk tatanan masyarakat Bangka. pada tahun 1770, Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (memerintah pada tahun 1758 - 1776) mulai mendatangkan pekerja-pekerja dari Cina untuk menambang Timah guna meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka, sejak itu mulailah berdatangan orang-orang Cina dari Siam, Malaka, Malaysia dan dari Cina Selatan ke Pulau Bangka.²⁸ Orang Tionghoa di Bangka didatangkan pada awal abad ke-18 ketika pertambangan resmi dibuka. Mereka umumnya tidak membawa istri sehingga menikahi penduduk bumiputera, baik Bangka, Jawa maupun Bali. Maka, menurut

²⁷ Harian kompas Selasa , 29 November 2011 “Selisik RUmah Demokrasi Bangka Belitung, ditulis oleh Bestian Nainggolan.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02433433/Selisik.Rumah.Demokrasi.Bangka.Belitung>.

²⁸ Ditulis oleh wiyanti pada hari jumat tanggal 22 oktober 2010

<http://dianwriter.blogspot.com/2010/10/berbagai-peran-etnis-cina-di-pulau.html>



Myra, Tionghoa di Bangka adalah “masyarakat peranakan sebenarnya, yaitu darah campuran Tionghoa dan pribumi.” Sedangkan Tionghoa di Belitung datang pada pertengahan abad ke-19 beserta istri-istri mereka. Mereka menjadi “peranakan berdasarkan orientasi hidup”²⁹.

Sosiolog sekaligus rector universitas Bangka Belitung menyampaikan ”Arus panjang sejarah pertambangan timah dan perdagangan itu secara khusus membentuk masyarakat di sini dalam kultur yang plural, terbuka, sekaligus egaliter,”³⁰ artinya secara umum, masyarakat Bangka Belitung sudah menyatu, tidak terlalu mempermasalahkan etnis, suku dan agama.

Dalam hal politik, perbedaan etnis dan agama juga tidak menjadi perdebatan panas di masyarakat Bangka Belitung. Basuki thahya purnama alias Ahok, terpilih sebagai bupati Belitung timur pada tahun 2005 dan menjadi bupati etnis tionghoa pertama di Indonesia. pada saat itu Kabupaten Belitung Timur adalah Kabupaten baru, pemekaran Kabupaten Belitung, dan Kabupaten baru ini mempunyai populasi hanya 90.000 orang. 4.7 % dari populasi tersebut adalah keturunan Cina .

Ketika melihat dari segi etnis dan agama, Ahok adalah seorang kristen, dan beretnis tionghoa. Namun beliau berhasil terpilih menjadi Kepala Daerah di tempat di mana mayoritas adalah kaum muslim (93.25%), sementara pemeluk kristen hanya 0.82%. Ahok-Khairul memenangkan pemilihan di Belitung Timur dengan pemerolehan suara 17.578 atau 37,13 % dari total 47.340 suara sah (Tempo Interaktif, Belitung, 19-8-2005).³¹

Tidak berhenti pada posisi bupati Belitung timur, 18 tahun menjabat, ahok bertarung lagi dalam pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung, ahok mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung di damping oleh Eko Cahyono yang merupakan mantan kepala Bappeda provinsi kepulauan Bangka Belitung. pemilukada 2007 tersebut di ikuti oleh 5 pasang calon yaitu Eko maulana alidan syamsudin Basari, Hudarnirani dan Ishak Zainuddin, Sofyan Rebuin dan Anton Gozelie, Fajar Fairi Rusni dan Hamzah Suhaimi, serta Basuki T. Purnama dan Eko Cahyono. Ketika kita melihat pemetaan pasangan calon, maka kita akan melihat bahwasannya semua berlatar etnis melayu dan beragama Islam kecuali Ahok yang beretnis Tionghoa dan beragama Kristen. Namun yang menarik ahok berada di posisi kedua (runner up) dibawah pemenang pemilukada yaitu Eko maulana Ali, bahkan Ahok menyalip incumbent gubernur sebelumnya hudarni rani³².

²⁹ Ditulis oleh Yudi Anugrah Nugroho, “Peranakan Tionghoa di Bangka Belitung”, di muat 29 november 2009.

http://historia.co.id/artikel/3/1295/Majalah-Historia/Peranakan_Tionghoa_di_Bangka-Belitung

³⁰ Harian kompas Selasa, 29 november 2011 “Selisik RUMah Demokrasi Bangka Belitung, ditulis oleh Bestian Nainggolan.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02433433/Selisik.Rumah.Demokrasi.Bangka.Belitung>.

³¹Catatan orang china dalam politik lokal ditulis oleh Thung ju lan. <http://kyotoreview.org/issue-11/catatan-tentang-orang-cina-indonesia-dalam-politik-lokal/>

³² Hasil penelitian lingkaran survey Indonesia tentang factor etnis dalam pilkada, kajian ini melihat pengaruh etnis yang ada di provinsi Kalimantan barat, Sulawesi selatan dan Bangka Belitung. Yang



Hasil penelitian lingkaran survey Indonesia juga menyatakan bahwa kekalahan Ahok disebabkan persiapan menghadapi pemilukada yang terlalu mepet, ahok baru menyiapkan segala kebutuhan pilkada beberapa bulan saja, sedangkan calon lain mempersiapkan jauh – jauh hari, setahun bahkan beberapa tahun sebelum menghadapi pemilukada.³³ Hal ini menggambarkan bahwa ahok mendapat banyak dukungan dari penduduk etnis melayu juga.

Terjunnya ahok ke kancah politik, menjadi inspirasi masyarakat tionghoa untuk mencoba peruntungan di kancah politik. Pada era orde baru selama 32 tahun, kaum minoritas, salah satunya etnis tionghoa seperti tidak memiliki hak politik, kebebasan mereka berpolitik sangat minim, padahal Sebelum era kemerdekaan, misalnya, tercatat ada lima orang Tionghoa yang ikut serta dalam PPKI dan BPUPKI, yaitu Liem Koen Hian, Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong How, Tan Eng Hwa, Oei Tiang Tjoei dan Yap Tjwan Bing. Bahkan, kalau ditarik lebih ke belakang lagi, yaitu pada era Sumpah Pemuda ada empat orang Tionghoa dalam pembacaan teks Sumpah Pemuda. yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, dan Tjio Djien Kwie³⁴.

Berakhirnya masa orde baru, seakan membuka keran demokrasi dan kebebasan berpolitik seluas – luasnya kepada masyarakat. Fify Lety Indra, seorang pengacara wanita keturunan Cina, yang didukung oleh *Partai Perhimpunan Indonesia Baru* (PIB) di damping politisi yugo saldian dari PDIP mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota pangkalpinang. Pemilukada kota pangkalpinang pada tahun 2008 tersebut di ikuti oleh 5 pasang calon.

Pasangan fify lety dan yugo saldian menempati posisi kedua. Hal ini menandakan dukungan rakyat pada pasangan fify dan yugo cukup besar. “Drs. H. Zulkarnain Karim, MM dan Drs. H. Malikul Amjad memperoleh suara sebesar 39.414 suara atau 54,87 persen, pasangan Drs. H. Ridwan Thalib dan H. Iswandi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang memperoleh 5.212 suara atau 7,26 persen, pasangan Drs. H.A. Huzarni Rani, M.Si dan Yohanes Yudistira yang diusung Partai Golkar, memperoleh 6.537 suara atau 9,10 persen, dan pasangan Fifi Lety Tjahaja Purnama, S.H, L.LM dan Yugo Saldian yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang memperoleh 16.087 suara atau 22,39 persen serta pasangan Hidayat Arsani dan Drs. H. Djailani AB yang diusung dan didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) serta Partai Damai Sejahtera (PDS), memperoleh

ditebitkan dalam Kajian bulanan edisi 09 januari 2008, lingkaran survei Indonesia (LSI)

http://www.academia.edu/3150565/The_Politics_of_Ethnicity_and_Identities

³³ ibid

³⁴ Ditulis oleh Bambang Ari Satria (Direktur Riset Serumpun Institute Bangka Belitung kumat, 05 Oktober 2012 <http://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/perspektif/6127/kesetaraan-politik-tionghoa.html>



4.588 suara atau 6,39 persen dari jumlah suara sah sebesar 71.838 suara.³⁵ Berdasarkan data di lima kecamatan dalam wilayah Kota Pangkalpinang perolehan suara adalah sebagai berikut³⁶ :

| Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang | | | | | Jumlah Akhir |
|--|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| | Bukit Intan | Rangkui | Pangkal Balam | Taman Sari | Gerunggang | |
| Drs. H. Ridwan Thalib dan H. Iswandi | 1.107 | 804 | 1.086 | 618 | 1.597 | 5.212 |
| Drs. H.A. Huzarni Rani dan Yohanes Yudistira | 1.107 | 1.585 | 1.482 | 579 | 1.389 | 6.537 |
| Fifi Lety Tjahaja Purnama, S.H, L.LM dan Yugo Saldian | 6.043 | 5.058 | 3.218 | 729 | 1.039 | 16.087 |
| Hidayat Arsani dan Drs. H. Djailani AB | 1.005 | 970 | 1.071 | 417 | 1.125 | 4.588 |
| Drs. H. Zulkarnain Karim, MM dan Drs. H. Malikul Amjad | 7.248 | 9.047 | 9.765 | 3.799 | 9.555 | 39.414 |

Sumber: KPU Kota Pangkalpinang

Ahok dan Fify, merupakan contoh etnis dan agama di Bangka Belitung tidak terlalu mempengaruhi pemilih dalam memilih pemimpinnya, namun kinerja dan dedikasi lebih diutamakan dibandingkan aspek struktur social.

³⁵ KPU Kota Pangkalpinang tahun 2010 Ditulis oleh wiwiyanti pada hari jumat tanggal 22 oktober 2010

³⁶ ibid



Beralih pada pemilihan legislative, etnis tionghoa juga mencatatkan nama mereka untuk mewakili masyarakat Bangka Belitung yang sebagian besarnya berpenduduk melayu dan islam di Senayan. Pada pemilihan DPR RI periode 2009-2014, Bangka Belitung mendapatkan tiga kursi yang dimenangkan oleh Basuki Tjahya Purnama (Partai Golongan Karya), Rudianto Djen (partai demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Paiman (partai Demokrat). Ketika dilihat pemetaan anggota DPR RI dari dapil Bangka Belitung berdasarkan etnis dan agama, maka dapat disimpulkan bahwa dua dari tiga anggota DPR RI dapil Bangka Belitung beretnis Tionghoa dan beragama Kristen, yaitu Basuki Tjahya Purnama dan Rudianto Djen. Begitu juga pemilihan DPR RI periode 2014-2019, dua kursi dari tiga kursi DPR RI dapil Bangka Belitung di isi oleh etnis tionghoa dan beragama Kristen, yaitu Ir Rudianto Djen (partai Demokrasi Indonesia perjuangan), eko Wijaya (partai Demokrat), dan hanya satu orang yang beretnis melayu dan beragama islam yaitu azhar romli.³⁷

Pada pemilihan DPD RI periode 2009-2014, dari empat kursi di senayan, dua dari mereka merupakan etnis tionghoa dan beragama keristen, yaitu Tellie Gozelie dan Bahar Buhasan, sedangkan dua anggota DPD RI terpilih lainnya Noorhari Astuti dan Rosman Djohan. Selanjutnya pemilihan DPD 2014-2019, meskipun jumlah anggota DPD RI Yang terpilih dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen relative lebih sedikit, namun masyarakat masih mempercayakan aspirasi mereka pada penduduk tionghoa, terbukti dari 4 DPD yang terpilih masih ada satu anggota yang dipercayai masyarakat dari etnis tionghoa dan beragama Kristen yaitu Tellie Gozelie yang pada periode sebelumnya juga terpilih, sedangkan ketiga lainnya adalah Hudarni rani, Herry Erfian, Zulkarnain Karim.³⁸

Dari fenomena pemilihan legislative baik DPR dan DPR RI, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan etnis dan agama tidak menjadi perdebatan hebat antar pemilih, mereka lebih melihat dan menimbang dari segi kinerja masing - masing calon. tercatat dari 7 perwakilan masyarakat yang ada di senayan periode 2009-2014 dapil Bangka Belitung, 4 dari mereka merupakan etnis tionghoa, yaitu, basuki tjahya purnama, bahar buhasan, Rudianto Djen, Tellie Ghozellie. Begitu juga 7 perwakilan yang ada disenayan periode 2014-2019 dapil Bangka Belitung, tiga dari mereka merupakan etnis tionghoa dan beragama Kristen, yaitu, Rudianto Djen, Eko Wijaya, Tellie gozelie.

PENUTUP

Perjalanan panjang provinsi Bangka Belitung, mulai dari pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga sekarang menjadi sejarah bahwa ada hubungan yang kuat antara Timah, etnis toinghoa, dan politik. Timah yang menjadi basis mata pencarian sebagian masyarkat Bangka Belitung, juga menjadi penyumbang besar pergolakan

³⁷ Selanjutnya dapat dibaca pada website resmi DPR RI <http://www.dpr.go.id/>

³⁸ Selanjutnya dapat dibaca pada website resmi DPD RI <http://www.dpd.go.id/>



perpolitikan di provinsi ini. Pengusaha timah berlomba – lomba hadir pada setiap bursa pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif, berbagai macam kepentingan mereka bawa untuk diperjuangkan dan dipertahankan demi tercapainya kepentingan pribadi dan golongan. Dapat dilihat Harapan besar mereka pun ingin hadir dalam setiap penentuan arah kebijakan.

Kehadiran mereka tidak hanya dibelakang layar, namun juga hadir di atas panggung mencoba peruntungan menjadi salah seorang yang memiliki wewenang dalam penentuan arah kebijakan di provinsi ini. Mulai dari calon kepala daerah hingga calon legislatif. Begitu juga etnis tionghoa, tidak dapat terlepas dari perpolitikan di Bangka Belitung. Bergulirnya orde baru seakan membuka keran kebebasan bagi mereka untuk hadir pada seluruh lini yang ada dalam Negara, termasuk dalam politik. Peristiwa reformasi ini seakan memberikan kembali hak – hak warga Negara yang pernah hilang selama puluhan tahun. Dengan berlatar belakang pengusaha mereka mulai bermunculan aktif pada setiap bursa pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislative. Hal ini dapat dilihat dari setiap pemilihan langsung, etnis tionghoa mendapatkan posisi yang cukup baik di mata masyarakat Bangka Belitung. Hal ini menandakan bahwa etnis tionghoa memiliki kedudukan yang sama dibangka Belitung dan juga dapat diharapkan dalam membawa perubahan di provinsi kepulauan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Chandhoke, 1995. State and civil society: Exploration in political theory. London: Sage Publication.
- Faroek Ishak Awang, 2003, develop East Kutai en perspective of future, Indo media: Bogor
- Istania Ratri, 2009, dinamika politik lokal, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi Lembaga Administrasi Negara

Penelitian dan Makalah

- Agustino Leo dan Agus Yusoff Mohammad, 2010, Politik Lokal di Indonesia : dari Otokratik ke reformasi Politik, jurnal Ilmu Politik Asosiasi Ilmu Politik Indonesia oleh penulis, edisi ke 21
- Kelompok Kerja Timah, 2013, Hasil penelitian IDH Tahun 2013, diakses pada tanggal 7 juni 2014

Media Online

- Ari Satria Bambang (Direktur Riset Serumpun Institute Bangka Belitung), 2012, Kesetaraan Politik Tionghoa
<http://m.radarbangka.co.id/rubrik/detail/perspektif/6127/kesetaraan-politik-tionghoa.html> diakses pada 12 juni 2014



- Ambalika Syari Indra, (Dosen Perikanan UBB) pada Belitungku.com (portal informasi pulau Belitung terkini) pada bulan april 2013.
- Anugrah Nugroho Yudi, 2009, Peranakan Tionghoa di Bangka Belitung. http://historia.co.id/artikel/3/1295/Majalah-Historia/Peranakan_Tionghoa_di_Bangka-Belitung. Diakses pada tanggal 15 juni 2014.
- Hasil penelitian lingkaran survey Indonesia, 2008, Factor etnis dalam pilkada, kajian ini melihat pengaruh etnis yang ada di provinsi Kalimantan barat, Sulawesi selatan dan Bangka Belitung. Yang diterbitkan dalam Kajian bulanan edisi 09 januari 2008, lingkaran survei Indonesia (LSI) http://www.academia.edu/3150565/The_Politics_of_Ethnicity_and_Identities, diakses pada 10 juni 2014.
- Ju Kan thung, 2006, china dalam politik lokaldi <http://kyotoreview.org/issue-11/catatan-tentang-orang-cina-indonesia-dalam-politik-lokal/> diakses pada 11 juni 2014.
- PT Timah, Penambangan Darat dan Laut. <http://www.timah.com/v2/ina/tentang-kami/910052012111105/operas/9610052010104055/penambangan-darat-dan-laut/>. Diakses pada tanggal 6 juni 2014
- Mada Kris dan Santosa Iwan, 2011, Pergolakan demi Timah Terulang Lagi, <http://tekno.kompas.com/read/2011/12/01/02222527/pergolakan.demi.timah.terulang.lagi> diakses pada tanggal 7 juni 2014.
- Nainggolan Bestian, 2011, Selisik Rumah Demokrasi Bangka Belitung, <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/29/02433433/Selisik.Rumah.Demokrasi.Bangka.Belitung>. Diakses pada 10 juni 2014
- Nuh Muhammad, 2010, Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung, Eramuslim.com,– Kamis, 21 Muharram 1431 H / 7 Januari 2010 11:29 WIB diakses pada tanggal 6 juni 2014
- Taufik Muhammad, 2013, Zaman Soeharto 27, era Gus Dur hingga SBY jadi 34 provinsi. <http://m.merdeka.com/peristiwa/zaman-soeharto-27-era-gus-dur-hingga-sby-jadi-34-provinsi.html> (Selasa, 23 April 2013 07:03:00) pada saat peresmian Kalimantan Utara oleh menteri dalam negeri, diakses pada tanggal 30 November 2016
- Wiwiyanti, 2010, <http://peran-etnis-bangka.com/2010/10/berbagai-peran-etnis-cina-di-pulau.html> diakses pada tanggal 11 juni 2014
- Laporan [antarababel.com](http://www.antarababel.com) yang diunduh pada tanggal 6 juni 2014, <http://www.antarababel.com/print/2511/dkp-babel-harapkan-perda-penambangan-dilaut>
- Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia. diakses pada tanggal 6 juni 2014
- Website KPU Kota Pangkalpinang, www.KPUPangkalpinang.go.id
- Website resmi DPR RI <http://www.dpr.go.id/>.

